

## Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Al-Qur'an : Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer

**Sunardi**

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: [sunnaelsalawi@gmail.com](mailto:sunnaelsalawi@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 10 Agustus 2024

Revised: 20 September 2024

Accepted: 22 September 2024

**Keywords:** Pancasila and Al-Qur'an.

***Abstract:** This article describes the values of Pancasila from the perspective of the Qur'an and this paper uses Gadamer's "fusion of horizon" theory as a tool for analysis. Indonesia is a multicultural country and a variety of religions, ethnicities, languages and distinctive values that show Indonesian values. Therefore, to form a country into a unified state, Pancasila is the unifier and religion is the belief and ideology of each individual. Looking at the text of the Al-Qur'an from the first precepts shows that from the divine side, it is very Qur'anic because it practices the values of the Qur'an. The second precept of the Al-Qur'an calls for justice and human values as the concept of a state and religion. The third precept expressly states that the Al-Qur'an strongly recommends the values of unity as a whole. The four precepts developed by the Indonesian state are based on the concept of the Qur'an which strongly advocates democracy (musyawarah). The five precepts of the Indonesian state are built on the values of welfare and social justice, which are the principles of the Al-Qur'an and the Al-Qur'an which threatens social discrimination*

---

### PENDAHULUAN

Dalam perjalanannya melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul, harus diakui bahwa al-Qur'an *shalih li kulli zaman wa makan*. Menyangkut ranah sosial, politik, dan budaya, kadang juga melibatkan atas nama agama sebagai pertempuran ideologi. Memang secara ideologis Pancasila adalah hasil dari resapan budaya, serta nilai-nilai bangsa Indonesia yang sangat prularal. Baik dari sisi keberagaman, kebudayaan, dan keyakinan masyarakat Indonesia, sejak berkembangnya peradaban Nusantara. (Rato, 2017, pp. 193–195) Akhir-akhir ini semakin memanas diantara beberapa ormas seperti Wahabi, HTI, FPI dan begitu seterusnya yang merongrong Pancasila dengan berbagai argumentasi, dan beranggapan Pancasila adalah tidak *Islami* bahkan *thagut* dan harus diganti dengan khilafah. Sedangkan Islam itu sendiri tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara, dan dasar negara, hal ini sangat tegas menurut Gus Dur “*sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana negara dibuat dan dipertahankan*”. Dasar yang dibuat landasan oleh Gus

---

Dur, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan Rasulullah setelah wafat, dan Rasulullah tidak berwasiat siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin negara dan dasar negara yang khusus.(Wahid, 2011, p. 43)

Pancasila bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai pandangan hidup, dan mengandung dasar tentang konsep kehidupan damai. Bangsa Indonesia mayoritas berpenduduk muslim terbanyak di dunia, akan tetapi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari berbagai suku, agama, dan ras. Maka dari itu Pancasila bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kedamaian, sehingga tidak ada pertumpahan darah satu sama lain.(Musolin, 2020, p. 60) Akan tetapi dengan munculnya berbagai ormas di Indonesia dan gerakan Islam transnasional, karena berbagai arus politik, dan efek dari globalisasi, ekonomi, dan ideologi sehingga menimbulkan banyak keragaman pemahaman bahkan tidak jarang saling menyalahkan.(Pedju, 2019, p. 101) Bahkan Islam transnasional mengupayakan umat Islam menjadi radikal dan keras, bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hukum Tuhan, sehingga kedatangan Islam transnasional di Indonesia menolak varian-varian Islam lokal dan nilai-nilai Pancasila.(Wahid, 2009, p. 43)

Pancasila di Indonesia ditempatkan oleh orang Islam sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila adalah sebagai ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia sekaligus Pancasila adalah bersumber pada sejumlah nilai-nilai agama. Dalam acuan paling dasar Pancasila berfungsi mengatur kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kolektivitas kepada kemasyarakatan. Walaupun Pancasila tetap harus diuji, apakah mampu mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Qur'ani atau tidak. Akan tetapi kunci yang sangat fundamental adalah Pancasila menjamin lima hal yang paling dasar yaitu, keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi, dan keselamatan propesi.(Arif, 2013, pp. 171–173) Dalam situasi yang seperti ini, maka nilai-nilai Pancasila diruang publik adalah cerminan dari Indonesia itu sendiri, meskipun dialektika antara Islam dan tentang Pancasila di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang. Dialektika ini muncul sejak awal perumusan dasar Negara kemerdekaan anantara kedua kutub ideologis (masyarakat yang meyakini Pancasila sebuah konsep yang final, dan kutub yang lain memperjuangkan konsep Islam sebagai landasan filosofis negara).(Pedju, 2019, p. 101)

Maka dari itu, konsep nilai-nilai Pancasila sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah konsep bernegara yang merupakan akumulasi pengalaman dan pergumulan sejarah dalam konsep pemikiran politik kenegaraan yang berabad-abad dalam upaya mengatur tata negara. Akan tetapi dari masa kemasa ada sebuah benturan konsep dan nilai-nilai Pancasila, seperti Islam tidak sejalan dengan demokrasi misalnya, atau sisten pemerintahan negara Indonesia aparatnya adalah kepolisian thaghut, dan negara Pancasila ada tuduhun harus diganti dengan sistem *Khilafah Islamiyyah*, merebaknya tuduhan terhadap nilai-nilai Pancasila. Tentunya ideologi yang seperti ini yang punya konsep *takfiri* terhadap nilai-nilai Pancasila, dan ideologi yang seperti banyak yang datang dari luar negri yang tidak sensitif terhadap kebinekaan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia.(Abdullah, 2020, pp. 135–137) Dengan tumbuhnya ideologi dan berkembangnya di Nusantara Indonesia, banyak yang menduduki posisi penting disemua organisasi sosial keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia yang merasuk kebutuh NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, tanpa terasa mereka bersuara berkampanye yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konteks keindonesian serta kebinekaan.(Abdullah, 2020, p. 138) Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba melakukan sebuah penelitian tentang “*Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Al-Qur'an, Implikasinya Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Akan mencoba untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur'an, sehingga problem akademik dan kegelisahan penulis akan

terjawab.

### Kajian Terdahlu

Studi ini termasuk model studi kualitatif dan studi kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu bentuk-bentuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini "*Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Al-Qur'an (Implikasinya Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia)*" lalu menguraikan analisisnya secara kritis faktor-faktor yang menyebabkan kemunculannya, dan terakhir diuraikan bagaimana keberadaan hadis-hadis jual beli online dalam ruang kontestasi hingga kontekstualisasinya di era kontemporer.

*Pertama*, karya ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang berjudul "*Kontestasi Islam Wasatiyah dan Pancasila Serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Syariah, Journal of Islamic Civilization, 2020, yang ditulis oleh Umi Kulsum*". Dalam artikel memberikan sumbangsi dalam penelitian, bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan konsensus yang sudah final, ada sebagian kelompok yang memberikan pernyataan bahwa Pancasila adalah *thagut*. *Kedua*, karya ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang berjudul "*Analisa Konsep Uneversalitas Nilai-Nilai Islam Dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) jurnal Potret Pemikiran, 2019 yang ditulis oleh Rizaldi P. Pedju*". Dalam artikel ini diketemukan sebuah analisis dan kesimpulan bahwa uneversalitas nilai Islam dan Pancasila mampu mengaktualisasikan Pancasila dengan pendekatan historis dan rasional, serta ciri *khas* ke-Indonesiaan. *Ketiga*, karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang berjudul "*Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat, Journal of Education and Teaching, 2020, yang ditulis oleh Doni Septian*". Kesimpulannya adalah, kerukunan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari pentingnya pemahaman dan fungsi Pancasila untuk mewujudkan cita-cita Bangsa baik secara tersirata maupun secara tersirat. *Keempat*, karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang berjudul "*Program Deradikalisasi dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila, Jurnal Fikri 2018, yang ditulis oleh Fuadi Isnawan*". Dalam penelitiannya memberikan gambaran bahwa, untuk mengembalikan para paham aktor teroris atau radikal atas pemahaman kejalan pemikiran yang lebih moderat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori pendekatan hermeneutika "*fursion of horizon*" ala "Hans-Georg Gadamer" sebagai kerangka teori guna melihat bagaimana "*Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Al-Qur'an*". Kemudian Gadamer melanjutkan konsepnya tentang horizon, konsep ini merupakan kontribusinya untuk heremeneutik kontemporer. Menurut Gadamer, bagian hakiki konsep situasi adalah konsep horizon.(Gusmian, 2019, p. 22) Horizon adalah jangkauan penglihatan yang mencakup segala hal yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Menurutnya apabila diterapkan pada pemikiran, maka akan berbicara tentang kesempitan horizon, tentang pelebaran horizon, tentang pembukuan horizon yang baru, dan begitu juga seterusnya. Menurut Gadamer seseorang yang tidak mempunyai horizon adalah seseorang yang tidak melihat cukup jauh dan karenanya terlalu melebih-lebihkan apa yang paling dekat padanya.(Hardiman, 2015, pp. 180–181)

Maka hubungannya dengan interpretasi menurut Gadamer, merupakan perjumpaan seorang pembaca dengan teks yang juga berarti perjumpaan kekinian pembaca dan tradisi yang mengitari teks itu sendiri. Perjumpaan seperti itu menghasilkan tegangan antara horizon pembaca dan horizon teks. Menurut Gadamer, yang disebut memahami bukanlah menghapus tegangan itu, melainkan justru mengeksplisitkan tegangan itu. Pelebaran horizon-horizon bukanlah asimilasi sebuah horizon ke dalam horizon lain, melainkan *interseksi* di anatara horizon-

horizon.(Hardiman, 2015, pp. 182–183) Teori horizon juga didahului adanya kesadaran tentang situasi hermeneutik. Situasi hermeneutik mengandaikan pemahaman seseorang terhadap suatu teks yang tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupinya. Termasuk juga didalamnya berupa epistemologi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, kepentingan praktis, bahasa tradisi, dan kultur, serta apa saja yang diindra oleh penafsir.(Kiptiyah, 2020, pp. 16–17)

Kemudian terori ini (Gadamer) juga akan dikuatkan dengan teorinya Jorge J.E. Gracia terhadap dunia interpretasi, (khususnya nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur'an) Gracia tidak mengkaji apa itu interpretasi secara umum, melainkan ia mencermati proses memahami akan pemaknaan sebuah teks. Maka Gracia membagi teks ke dalam lima bentuk yang berbeda. *Yang pertama, actual text*, bentuk teks ini pada prakteknya lebih mengarah pada *historical text*. *Yang kedua, intermediary text* atau teks perantara. *Yang ketiga, contemporary text*, atau teks kontemporer. *Yang keempat, intende text*, atau teks yang dimaksud. *Yang kelima, ideal text*, atau teks ideal.(Annibras, 2016, p. 74) Gerak awal yang harus dilakukan dalam menginterpretasikan teks atau pun wacana adalah menilik horizon objek interpretasi, baik yang berkaitan dengan kondisi psikologis *historical author* makna yang dimaksud, pemahaman *historical audienci* ketika pertama kali teks dibuat, dan setiap elemen yang memiliki peran lahirnya sebuah teks.(Muslim, 2018, p. 282)

Menurut Gracia interpretasi adalah melibatkan tiga elemen, yaitu teks yang ditafsirkan, (*interpretandum*), penafsir, dan keterangan tambahan (*interpretans*). (Syamsuddin, 2017, p. 113) Dengan melibatkan *interpretandum* atau teks historis, dan juga *interpretans* akan memuat tambahan-tambahan penafsiran penafsir sehingga *interpretandum* lebih dapat dipahami. Yang paling pokok bagi Gracia, adalah fungsi makna teks yang harus disampaikan kepada audiens. Pemahaman audiens terhadap teks sangat beragam dan bervariasi, antara satu dengan yang lain, maka tidak mengherankan jika dalam beberapa kasus terjadi ketidakpahaman.(Gracia, 1995, pp. 147–148)

*Interpretandum* dan *interpretans* memiliki relasi yang sangat signifikan, karena lahirnya *interpretans* untuk menjelaskan *interpretandum*.(Gracia, 1995, p. 148) Dalam hal ini Gracia memberikan jawaban dalam fungsi interpretasinya, yaitu *historical function*, tujuan penafsir adalah untuk menciptakan pemahaman dibenak audiens kontemporer, *meaning function*, fungsi perkembangan makna, bertujuan untuk menciptakan pemahaman dibenak audiens kontemporer dan mengembangkan makna dari suatu teks, dan *implicative function*, yaitu untuk memunculkan pemahaman dibenak audiens, sehingga makna dari teks yang ditafsirkan dapat dipahami.(Wathani, 2017, pp. 209–212) Teori ini tentunya tidak lahir begitu saja tanpa disertai dengan sudut pandang Gracia dalam memahami dan memaknai sebuah teks.(Gracia, 1995, p. 4)

Maka menurut Gracia, mengetahui klasifikasi teks dari sudut pandang eksistensinya sangat signifikan, karena hal tersebut akan membantu untuk mengetahui peran pengarang dan penafsir.(Syamsuddin, 2017, p. 100) Karena itu, Gracia membagi teks dari sisi fungsi linguistik dan kulturalnya. Adapun ditinjau dari sisi fungsi linguistiknya, teks dapat dibagikan pada lima bagian, yaitu: *informatif text*, *directive text*, *expresive texts*, *evaluative text*, dan *performative text*. Adapun dari fungsi kulturalnya, teks itu sangat beragam, diantaranya yaitu: *legal text*, *literary text*, *philosophical text*, *scientific text*, *religious texts*, *historical text*, dan *political text*.(Syamsuddin, 2017, pp. 100–101)

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara dan Pancasila serta dan tiga pilar lainnya (UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), adalah hasil konsensus pendiri bangsa Indonesia. Walaupun sampai sekarang masih

banyak menyisakan persoalan di kalangan minoritas umat Islam, bahwa selama era reformasi isu tentang negara Islam terus dikobarkan. Sehingga ada wacana gerakan Negara Islam Indonesia sebagai aksi ideologi-politik bawah tanah membawa kesan yang sangat kuat, bahwa kontroversi gagasan Negara Islam Indonesia, dengan argumen bahwa Negara Pancasila belum selesai.(Baidhawiy, 2015, pp. 45–46) Tentunya gerakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, perlu menoleh yang lebih jauh, karena Pancasila, karena hakikat dari Pancasila itu adalah berfungsi mengatur kolektivitas bangsa, maka agama memberikan kolektivitas dalam ranah kemasyarakatan.(Arif, 2013, p. 172)

Dengan gagasan ini, para pendiri Bangsa dalam mempertahankan negara yang didasarkan bukan untuk agama tertentu, melainkan negara bangsa yang mengakui dan melindungi segenap agama, keragaman budaya serta tradisi yang menjadi bagian integral dalam bernegara dan berbangsa Indonesia. Karena mereka sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama, bahkan dalam nilai-nilai Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama agama.(Wahid, 2009, pp. 16–17) Karena di Indonesia banyak terdiri dari berbagai bahasa, pulau, agama, ras, suku, dan bangsa yang merupakan kekayaan yang dimiliki dan terbingkai dalam Kebhinekaan Tunggal Ika, sehingga Pancasila harus menjadi satu-satunya ide dasar Negara Republik Indonesia, makna dan nilai-nilai yang terkandung harus di pahami baik yang tersurat maupun yang tersurat.(Septian, 2020, p. 158)

Maka dari sini penulis akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. *Yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”*, teks ini yang yang dicantumkan dalam sila pertama, tidak ada teks “*Declaratin of Indonesia*”, sila pertama ini tidak pernah ditulis di dunia yang memasukkan konsep ketuhanan di dalamnya, apalagi mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dan konsep suatu negara.(Hidayat, 2017, p. 2) Dari sini bahwa bangsa Indonesia dari sisi politik mencantumkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimasukkan sebagai sila pertama, maka tidak ketika Soekarno sebangsa salah satu pendiri Bangsa (Bapak Bangsa), menurutnya di Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Hal ini bisa bisa dibuktikan dari penelitian sejarah agama-agama di Indonesia. Para sejarawan di Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia sudah beragama, dari mulai priode pertama (periode pra Hindu), lalu saf kedua (periode Hindu), dan saf ketiga ialah periode Islam dan terakhir penjajahan.(Hidayat, 2017, pp. 3–4)

*Sila yang kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap”*, sila yang kedua, mengapa kata “Kemanusiaan” dan sifat “Adil”, artinya sila ini sangat penting menjadi konsep dan dasar suatu negara untuk menjadikan sebuah dasar. Karena belum tentu semua manusia mampu bersifat adil dan beradap, sehingga dalam benak konseptor ini sangat signifikan. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dan dianggap sangat penting sebagai etika-politik kehidupan bernegara serta hubungan timbal balik. Maka menjadi urgen bahwa bangsa Indonesia memuliakan hak-hak asasi manusia, politik dan ekonomi, serta budaya dan sosial.(Latif, 2018, p. 13)

*Sila yang ketiga, “Persatuan Indonesia”* dalam sila ketiga ini, kebangsaan itu lahir karena tiga hal, kehendak untuk bersatu, menjunjung tinggi persamaan nasib dan karakter, dan kaitan antara tanah air dan penduduk yang mendiaminya. Karena menurut pengamatan Soekarno, dari suku-suku bangsa itu memiliki ciri khas yang membedakan satu dengan yang lain, sehingga orang Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dari pada negara-negara lain.(Hidayat, 2017, p. 12) Maka dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan, Indonesia adalah negara persatuan paham tentang golongan. Karena persatuan dari kebhinekaan ini Indonesia berdasarkan konsepsi

kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam bingkai keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dinyatakan dengan sebuah ungkapan “bhineka tunggal ika”.(Latif, 2018, p. 13)

*Sila yang keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”*, negara Indonesia adalah negara yang multikultural, akan mampu bertahan dan kokoh jika berdiri berlandaskan pengelolaan pemerintah yang mampu menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, dan persaudaraan. Sehingga dalam mewujudkan dan mengembangkan solidaritas sosial demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup berbangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia mampu menjaga dan memelihara asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan serta kebijaksanaan bermusyawarah. Begitu juga nilai kerakyatan dalam tata bernegara dan berbangsa menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Dari sini tentunya perlu menegaskan dalam sistem kerakyatan untuk menampung dalam institusi, bahwa warga masyarakat berkumpul, berbincang, bernegosiasi, membuat kompromi dan konsensus bersama melui permusyawaratan untuk mufakat, sehingga dapat mengakomodir kepentingan bersama dengan tanpa memandang sebelah pihak.(Pedju, 2019, pp. 108–110)

*Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”*, dalam sila kelima ini menggambarkan adanya sebuah keadilan dan menegaskan keadilan, baik keadilan sosial dan keadilan ekonomi, sehingga persamaan ekonomi hanya dapat dicapai lewat sistem sosialisme ala Indonesia. Maka dalam hal ini memerlukan sistem berubahnya dasar-dasar pergaulan hidup kemanusiaan yang dapat menghilangkan imperialisme dan kapitalisme. Dari sini membutuhkan sosialisme semua rakyat dan rakyat mau bekerja sama dan semua rakyat berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang punya skill dalam kepemimpinan.(Hidayat, 2017, p. 17) Sehingga gagasan idealisme terkait dengan keadilan sosial akan terwujud dalam bangsa Indonesia. Karena keadilan merupakan manifestasi sosial pertama dari *tauhid* Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip keadilan ini adalah dari moral ketuhanan, landasan pokok pri kemanusiaan, simbol persatuan, dan kedaulatan rakyat.(Pedju, 2019, p. 110)

### **B. Pancasila Perspektif Al-Qur’an Kontekstualisasi (Pendekatan Hermeneutik Gadamer Fusion of Horizon)**

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian pada pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana horizon nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur’an dan fitur-fitur horizon yang terkait sehingga menemukan konteksnya sesuai dengan konteks negara Indonesia. Karena itu, konteks makro maupun mikro tentang nilai-nilai Pancasila akan menemukan signifikansinya terhadap nilai-nilai ke-Indonesiaan dengan nilai-nilai Qur’ani. Karena Pancasila menjadi dasar dan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka secara berpolitikan hubungan negara dengan agama di Indonesia akan membawa wawasan yang mendalam terkait dinamika hubungan agama dan politik di Indonesia. Penyusunan konstitusi menjelang hari-hari kemerdekaan sudah muncul bibit-bibit konflik ketidaksetujuan pro-kontra, bahkan memperlihatkan bibit-bibit konflik pada ranah sosial masyarakat yang mengancam hubungan antara hubungan negara dan agama. Maka dari itu penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, banyak memunculkan bibit antagonisme hubungan politik, khususnya antara Islam dan negara.(Basri & Budiharto, 2020, p. 22)

Pada pembahasan ini akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dari alinea pertama sampai alinea kelima perspektif Al-Qur’an. *Sila Pertama penulis mengutip Surah An-Nahl Ayat 22, Sila Kedua Surah An-Nahl Ayat 90, Sila Ketiga Surah Al-Hujarat Ayat 13, Sila Keempat Surah Ali Imran Ayat 159, dan Sila Kelima Surah As-Syura Ayat 38.* Sebelum menjelaskan Sila Pertama

tentang nilai-nilai Pancasila persrptertif Al-Qur'an, alangkah baiknya penulis menjelaskan agama-agama yang resmi dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena hal ini juga mencakup nilai-nilai keyakinan menurut agama masing-masing dan mencakup ketuhanan masing-masing.

Ada enam agama di Indonesia yang resmi di akui oleh negara, dan punya penganan dan prinsip ketuhanan masing-masing. *Yang pertama Agama Islam*, kitab sucinya Al-Qur'an yang diturunkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad saw, sejak sekitar 1400 tahun yang silam sampai (sekarang 2023) jumlah penganutnya 207.176 jiwa (87.18%). *Yang kedua Agama Kristen Protestan*, kitab sucinya Alkitab yang dibawa oleh Yesus Kristus, dimulai sekitar 2000 tahun yang silam hingga tahun 2020, dan penganutnya 16.528.513 jiwa (6,96%). *Yang ketiga Agama Katolik*, kitab sucinya Alkitab yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang dimulai sejak 2000 tahun yang lalu hingga sekarang 2020, dan jumlah pengikutnya 6.907.873 jiwa (2.91%). *Yang keempat Agama Hindu*, nama kitabnya Weda yang dibawa oleh Para Maharsi yang dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu, dan jumlah pengikutnya 4.012.116 jiwa (1.6,96%). *Yang kelima Agama Buddha*, nama kitabnya Tri Pitaka yang dibawa oleh Sidharta Gautama, dimulai sekitar 2.500 tahun yang lalu sampai sekarang 2020, dan jumlah penganutnya 1.703.254 jiwa (0,72%). *Yang keenam Agama Kong Hu Cu*, nama kitabnya Si Shu Wu Ching yang dibawa oleh Kong Hu Chu, dimulai sekitar 2.500 tahun yang lalu sampai sekarang 2020, dan jumlah pengikutnya 117.091 jiwa (0,05%).(Watra, 2020, pp. 24–25) Kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam sila pertama (*Ketuhanan Yang Maha Esa*) dalam perspektif Al-Qur'an, sebagai berikut:

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

Artinya: “Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong”.

Ayat di atas (*Ilahukum Ilahu Wahid*) *An-Nahl* Ayat 22, bahwa ayat ini memberikan gambaran umum pada kita mengenai Tuhan Yang Maha Esa, yang mengidikikasikan tiada Tuhan yang berhak disembah yang bersifatan dengan sifat Esa, baik di dalam *dzat-Nya, sifat-Nya dan af'al-Nya*.(Al-Shawi, 2007, p. 515) Konotasinya adalah orang yang beriman pada hari akhirat dan senang pada keberhasilan pahala yang kekal dan takut akan siksa-Nya maka ia kan menyimak dengan seksama pada bukti ke Esaan Allah serta mengevaluasi dan memotivasi diri.(Al-Razi, 1981, p. 17)

Ayat di atas di masa Nabi Muhammad saw. (konteks mikro) bahwa ayat tersebut *mengkhithabi* orang-orang musyrik dilakangan Qurays, bahwa mereka menyembah dan meminta pada selain Allah, yaitu menyembah pada benda-benda mati yang tidak bernyawa dan menyembah berhala-berhala yang tidak bisa memberikan bahaya dan mamfaat. Orang-orang musyrik Qurays pun tidak merasa dan tidak mengetahui berhala-berhala yang mereka sembah kapan akan dibangkitkan di hari kiamat, kemudian turun ayat (*Ilahukum Ilahu Wahid*). (Al-Thabari, 2001, pp. 196–197) Imam Suyuthi senada dengan Thabari meriwayatkan dari Abdu bin Humaid, Ibn Jarir, Ibn Mundzir, dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah meriyatakan “Allah yang Maha Pencipta, bahwa berhala-berhala yang kalian sembah adalah benda mati yang tidak bernya, dan tidak memberikan efek negatif maupun efek positif”, kemudian turun ayat (*Ilahukum Ilahu Wahid*). (Al-Suyuthi, 2003, p. 27)

Melihat konteks historis ayat tersebut tentu ada korelasi dengan semua gama yang berlaku pada masa itu (pra-Islam) pada era prasejarah, semua praktek tradisi, kultur, adat istiadat, norma, dan agama. Konteks Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lepas dari konteks agama-agama yang ada di Indonesia, karena umumnya agama yang resmi di Indonesia menggunakan panduan kitab suci.

Masing-masing agama baik Islam, Kristen, Buddha begitu seterusnya mempunyai panduan hidup dan norma yang berupa kitab suci. Seirama dengan perjalanannya waktu tradisi sebuah interpretasi terhadap kitab suci berkembang dari waktu kewaktu.(Abdullah, 2020, pp. 30–33) Karena penafsiran kitab suci berkembang dari waktu kewaktu, akan tetapi jika hanya dilihat dari sisi ayat (*Ilahukum Ilahu Wahid*), dalam nilai-nilai Pancasila pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) adalah konsep Islam, karena Tuhan umat Islam hanya bertuhan pada Allah Yang Esa.

Akan tetapi pada konteks ke-indonesian, setiap agama memiliki Tuhan masing-masing yang selaras dengan keyakinan umat beragama. Menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, dan begitu juga agama lain yang menjalankan agamanya adalah salah satu mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Maka dalam konteks ini (interpretasi konteks ke-Indonesiaan), bahwa yang bertuhan adalah manusia, kepatuhan kepada agama masing-masing umat merupakan tanggung jawab dalam beragama, sedangkan kepatuhan pada Pancasila adalah kepatuhan dalam berbangsa dan bernegara. Secara implisit, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dan tidak bertentangan dengan Islam, semua agama di Indonesia bisa menjalankan agamanya masing-masing dan hal itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.(Gusman, 2019, pp. 172–175) yang berisi prinsip ketuhanan, yang mengindikasikan menjamin kebebasan dalam beragama, serta tidak saling mendiskriminasikan satu agama dengan agama lain. Pada hakikatnya sila pertama adalah merealisasikan kemaslahatan lima dasar pokok, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga generasi, menjaga harta, serta menjaga tanah air negara dan menjaga lingkungan.(Kulsum, 2020, p. 57)

Dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah adanya horizon tentang nilai-nilai Pancasila mengindikasikan seluruh rakyat Indonesia diharuskan untuk beragama dan bertuhan. Karena dari segi rumusannya sila pertama mencerminkan suatu konsep ketuhanan monoteisme hanya pada satu Tuhan. Konsep ini bagi umat Islam adalah tauhid, karena semua Rasul membawa konsep tauhid dan membawa misi tauhid pada umatnya. Mengilustrasikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang menuntut hendaknya sesama manusia menuju kerukunan, menghormati kebebasan beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing, yang pada dasarnya dalam beragama tidak ada paksaan saling bermusuhan.(Musolin, 2020, p. 69) Sebagaimana Nabi Muhammad saw. membangun Madinah adalah sebuah entitas politik berdasarkan *nation-state* untuk seluruh umat dan warga tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada, karena negara-bangsa yang dibangun atas penyatuan seluruh umat baik kaum Yahudi maupun kaum Muslimin sebagaimana piagam Madinah.(Mulkhan, 2007, p. 22)

Epistemologi yang mencakup semua fitur dalam memahami sila pertama yang mengantarkan adanya sebuah horizon dimana sebuah teks dibaca dan ditafsirkan. Dari semua fitur yang mencakup nilai-nilai ketuhanan yang diamalkan oleh semua agama di Indonesia akan menjadi sebuah *systems*, bahwa menjalankan poin dari rakyat, negara untuk rakyat dan negara oleh rakyat. Sila pertama menjadi satu kesatuan pada sila-sila berikutnya yang pada dasarnya negara menjamin bagi penduduk yang beragama dan melarang penduduk yang tidak beragama. Sehingga pada sila pertama negara Indonesia memberikan jalan tengah dalam pembentukan suatu dasar negara satu agama dengan agama lain tidak menimbulkan konflik karena sama-sama mengamalkan nilai-nilai Ketuhanan Maha Yang Esa.(Fathani & Qodir, 2020, p. 122) Melihat semua fitur tujuan dari ketuhanan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa sila pertama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, bahkan dalam sila pertama mencakup nilai-nilai Qur'ani.(Sukri, 2019, p. 91) Kemudian memasuki sila kedua (*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*) bagaimana nilai-nilai Pancasila pada sila kedua perspektif Al-Qur'an, hal ini akan

dijelaskan dalam *Surah An-Nahl Ayat 90*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Nilai-nilai Pancasila pada sila kedua adalah termaktub nilai-nilai adil dan ayat di atas menjelaskan konsep adil secara umum. Adil adalah sesuatu yang wajib, karena Allah adalah Maha Adil terhadap hamba-hamba-Nya.(Al-Zamakhshari, 1998, p. 464) Hasan At-Tusi memaknai al-Adlu bermakna *al-inshaf* secara etimologi berarti moderat diantara para makhluk dan tindakan sesuatu yang wajib pada orang *mukallaf*. Kemudian konsep beraadap “*al-ihsan*” berbuat baik pada sesama.(At-Tusi, n.d., p. 418) Abu Hayyan memaknai adil, menurutnya adil adalah mengerjakan sesuatu yang ditetapkan yang berbentuk aqidah dan syari’at, bergaul dengan manusia dengan amanah, tidak berbuat dzalim, bertindak moderat, dan memberikan sesuatu pada haknya.(Hayyan, 1993, p. 513) Latar belakang konteks mikro ayat di atas adalah diriwayatkan dari Utsman bin Madzun ia berkata “*setelah turun ayat tersebut ia membacakannya pada Ali bi Abi Thalib, kemudian kagum seraya berkata: wahai keluarga Ghalib ikutilah sifat adil itu niscaya kalian akan beruntung, demi Allah sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya pada kalian dengan konsep etika yang agung*”. Sebagian riwayat dari Ikrimah mengatakan “Rasululah saw. membacakan ayat tersebut pada Walid bin Mughirah”.(Al-Qurtubi, 2006a, p. 165)

Melihat konteks historis ayat di atas betapa pentingnya membangun negara-bangsa atas moralitas, keadilan dan kejujuran. Nilai-nilai keadilan adalah sebuah relasi antara manusia baik yang berbentuk individu maupun kolektif, karena kemanusiaan yang adil harus termenifestasikan relasi yang adil dan beradab, karena semua warga negara Pancasila berhak mendapatkan atas persamaan hidup dan persamaan relasi kemanusiaan.(Baidhawiy, 2015, pp. 52–53) Prilaku dan sikap manusia yang adil beradab ini lah mencerminkan sifat Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Memuliakan hamba-Nya. karena sifat keberadaban dan keadilan sehingga menjadi sebuah ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas sesama manusia secara universal.(Basri & Budiharto, 2020, p. 30) Sehingga nilai-nilai Pancasila mampu membentuk pola pikirnya dari berbagai aspek, baik agama, budaya, norma, sosial dan begitu seterusnya. Maka internalisasi nilai-nilai Pancasila mampu mewujudkan pada nilai-nilai keadilan, ajaran, keyakinan dan kesedaran atas konsensus nilai-nilai Pancasila.(Siti Nurjannah, 2017, p. 103) Kemudian masuk pada sila ketiga “*Persatuan Indonesia*” nilai-nilai Pancasila sila ketiga perspektif Al-Qur’an termaktub dalam *Surah Al-Hujarat Ayat 13*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas mencakup berbagai fitur aspek kehidupan, baik mencakup nilai fisik seorang, suku, bangsa dan begitu seterusnya. Maka ayat di atas ada beberapa aspek konteks mikro (konteks historis). Menurut Jalaluddin Al-Suyuthi konteks yang pertama, Ibn Mundzir meriwayatkan, Ibn Abi Hatim, dan Baihaqi dari Ibn Abi Malikah mengatakan “pada fathu Makah Bilal naik ke

Ka'bah kemudian adzan, maka menjadi perbincangan manusia mengatkan orang yang hitam ini adzan di atas Ka'bah sehingga sebagian mereka kalau Allah murkah pada orang ini niscaya Allah akan Menggantinya, kemudian turunlah ayat “*Ya Ayyuhannasu Inna Khalaknakum min dzakari wa untsa*”. Kemudian konteks yang kedua “Bukhari, Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Abbas mengatakan “*Assyu'ub*” adalah tempat berkumpulnya asal setiap sesuatu seperti nasab dan asal kelahiran anak kemudian beralih menjadi suatu kumpulan seperti kota Mesir dan seterusnya, kemudian “*qaba'il*” “*adalah suku-suku yang saling berkenalan*”, dan konteks yang ketiga adalah khotbah Rasulullah saw. pada haji Wada' mengatakan “*Wahai manusia ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah satu, ingatlah tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang Ajam, begitu orang Ajam atas orang Arab, yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, dan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam kecuali nilai ketakwaan*”.(Al-Suyuthi, 2003, pp. 191–195).

Nilai nilai dan konteks ayat di atas tidak boleh adan unsur diskriminasi, baik diskriminasi agama, suku, ras dan begitu seterusnya. Karena konotasi ayat di ayat adalah signifikasinya pada pembacaan konteks horizon “*lita'arafu*” saling kenal dan saling memperkuat aspek kerukunan. Melihat kultur-budaya negara Indonesia yang sangat beragam, persatuan dan kesatuan adalah dasar paling fundamen. Karena sulitnya mempersatukan negara Indonesia yang dihuni oleh beragam agama, golongan, suku, bahasa, dan aliran ormas kecuali dengan menegakkan nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil Beradab.(Kulsum, 2020, p. 55) Kemudian memasuki *sila keempat* perspektif Al-Qur'an termaktub pada *Surah Ali Imran Ayat 159*:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Korelasi ayat di atas pada konteks demokrasi (*musyawarah*), maka pada “*syawir*” menggunakan redaksi amar, kemudian apa implikasi amar pada konteks demokrasi dan korelasinya dengan konteks nilai-nilai Pancasila. Menurut Ibn Huwaiz Mindad, mengatkan musyawarah (sistem demokrasi) adalah wajib bagi jajaran pemerintah untuk berunding melakukan *musyawarah* bersama ulama, mencakup hal yang diketahui dan mencakup hal yang *muyskil* dalam urusan agama, sisi pasukan angkatan perang pada sesuatu yang terkait perang, sisi manusia pada sesuatu yang terkait kemaslahatan manusia, sisi sekretaris negara, kementrian, dan juru kerja dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan negara dan kemakrunnya.(Al-Qurtubi, 2006b, p. 380) Konteks ayat di atas secara historis (konteks mikro) dilatar belakangi atas perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk bermusyarah. Basyar menceritakan padaku, dari Yazid menceritakan pada kami, dan Sa'id menceritakan pada kami dari Qatadah mengatakan “*Allah menyuruh Nabi Muhammad saw. untuk musyawarah pada sahabat-sahabatnya dalam berbagai hal*”.(Al-Thabari, 2001, p. 188)

Karena itu, musyawarah adalah sesuatu yang sangat signifikan dalam berbagai kehidupan. Khatib meriyatakan dari sekian banyak riwayat dari Imam Malik dari Ali bin Abi Thalib berkata “*saya bertanya Rasulullah saw. urusan selalu silih berganti datang, al-Qur'an di dalamnya tidak diturunkan dan kami tidak darimu tentang sesuatu, kemudian Rasulullah menjawab, kumpulkanlah orang-orang yang ahli ibadah dari umatku, dan musyawaralah diantara kalian, dan jangan memutuskan sesutu hanya dari satu argumen*”.(Al-Suyuthi, 2003, p. 168). Dari konteks ayat di atas mencakup banyak korelasi tentang nilai-nilai Pancasila dan

horizon konteks historis serta horizon konteks atas pembacaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “*syawir*” yang berkonotasi perintah, yang berimplikasi untuk mewujudkan demokratis yang mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Para pendiri bangsa telah sepakat atas negara demokrasi, walaupun Indonesia melalui beberapa fase demokrasi, demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi.(Septian, 2020, p. 161) Pada dasarnya demokrasi adalah dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Maka melihat konteks ayat di atas yang melatar belakangi konteks historis dan konteks ayat pada masa itu, kemudian signifikansi ayat terhadap horizon pada konteks ke-indonesian. Melihat kemajmukan negara Indonesia, tidak hanya terdiri dari satu negara yang untuk satu orang, bukan pula hanya untuk satu golongan, akan tetapi satu bangunan negara menaungi semua suku, ras, agama dan betu seterusnya, tentu musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan satu-satunya.(Septian, 2020, p. 162) Untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam visi demokrasi adalah memperoleh penguatan daulat rakyat, kebebasan politik, kebebasan ekonomi dan menghidupkan semangat persaudaraan mufakat. Sehingga keputusan tidak didikte oleh suatu golongan mayoritas atau golongan minoritas.(Latif, 2018, p. 12) Kemudian memasuki *sila kelima* termaktub dalam *Surah As-Syura Ayat 38*:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Makna global dari ayat di atas adalah indikasi dari sebuah anjuran *keta’atan* pada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan shalat, dan selalu musyawarah dalam konteks kemaslahatan sesama manusia sehingga tidak terjadi rasa bosan dan perselisihan, dan saling membantu dengan berbagai argumen kemaslahatan.(Katsir, 2000, p. 285) Karena turunnnya ayat di atas secara historis banyak dilatar belakangi berbagai historis, sebagaimana didapatkan informasi dari Yunus menceritakan padaku, ia berkata, Ibn Wahb menceritakan pada kami kemudian ia berkata “*orang-orang yang memenuhi panggilan Allah untuk mengsakn-Nya mengakui keesan-Nya, tidak menyembah pada selain Allah, mendirikan shalat, musyawarah, dan membelanjakan sebagian hartanya dijalan Allah serta melaksanakan hak kewajiban yang Allah tetapkan pada orang yang berhak seperti nafaqah dan zakat*”.(Al-Thabari, 2001, pp. 521–522)

Ayat di atas ada korelasi dengan ayat sila keempat, pada dasarnya sigfinakansinya adalah kesejahteraan sosial dan menerapkan keadilan sosial “*wa mimma razaknahum yunfikun*”. Melihat makna horizon dari sisi historis adalah melaksanakan hak dan kewajiban serta menyampaikan sesuatu pada yang berhak. Kemudian nilai-nilai horizon untuk pembacaan pada konteks sila kelima, mengandung interpretasi yang berindikasi setiap warga negara diperlakukan sama tanpa melihat status perbedaan ras, suku, bahasa, dan kaya maupun miskin serta tanpa melihat status jabatan. Dengan tujuan mewujudkan sikap keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai konteks sosial, memberikan pertolongan serta mewujudkan kesejahteraan terhadap warga negara.(Septian, 2020, p. 162) Kesejahteraan dalam koridor keseimbangan anatara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara makhluk individu dan sosial, keseimbangan antara sipil dan politik dan keseimbangan antara sosial dan budaya.(Latif, 2018, p. 13)

### C. Signifikansi Pancasila Perspektif Al-Qur’an Konteks Ke-Indonesiaan Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Konteks ke-islaman dan ke-indonesian di era kontemporer mencakup segala aspek dan

berbagai lini kehidupan, maka membutuhkan sebuah perangkat atau metode dari semua fitur metodologi untuk mentransformasikan sebuah ajaran agama keberbagai kehidupan umat. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memahami kembali secara mendasar dan makna teks suci dengan kemaslahatan dan kemanusiaan universal untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat yang beradab dan majemuk, dan hal ini perlu melakukan rekonstruksi *maqasid* konvensional-tradisional adalah hilangnya pemahaman tentang adanya *maqasid* yang umum, yang lebih fundamental-substansial di era kontemporer seperti bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur'an, agar menemukan signifikansi makna dan konteks makro maupun konteks mikro pada era kontemporer. (Abdullah, 2020, p. 145)

Kemudian fitur ramuan signifikansi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan *system cognition, holism, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality* dan *purposefulness* dapat diaplikasikan pijakan dan dipraktekkan dalam memahami nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur'an. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi mendikhotomikan atau bahkan memisahkan sains-teknologi dengan teks suci agama. (Abdullah, 2020, pp. 160–161) Menjadi sebuah ajuan, bahkan anjuran dalam sebuah penafsiran sebuah konteks, bukan sekedar pembacaan dan pemahaman atas teks melainkan representasi teks atas ruang sosial-budaya sehingga tidak bersifat literal teks (kearaban), tetapi mempertimbangkan konteks di mana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Maka terkait dengan nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur'an, setidaknya memenuhi empat elemen dan fitur horizon utama, yaitu keterpengaruhannya sejarah, adanya pra-pemahaman pembaca teks, fusi antara horizon teks, dan horizon pembaca, kemudian setelah pesan tersebut diaplikasikan pada masa kini, maka bukan makna literal teks, tetapi *meaningful sense* “makna yang berarti”. (Gusmian, 2019, pp. 22–23)

Maka untuk menggali makna historis teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan signifikasinya fenomenal historis terhadap pembacaan teks, kemudian pembaca teks harus mempertimbangkan serta menganalisa bahasa teks, baik kosakata maupun strukturnya. Setelah menganalisa kosakata, maka langkah berikutnya melakukan intratekstualitas, pembaca harus membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan redaksi yang lain, setelah memperhatikan intratekstualitas maka pembaca harus memperhatikan konteks historis ayat-ayat Al-Qur'an terkait nilai-nilai Pancasila baik yang bersifat mikro maupun makro, langkah terakhir setelah memperhatikan konteks historis maka pembaca harus menggali *maqasid* (tujuan atau pesan utama ayat-ayat Al-Qur'an terkait nilai-nilai Pancasila), setelah mengetahui *maqasid* utama dari teks Al-Qur'an maka akan membantu untuk mengkontekstkan pada konteks era kontemporer dan era digital. (Syamsuddin, 2020, pp. 9–13)

### **Kesimpulan**

Pancasila sebagai asas Negara Kesatuan Republik Indonesia menaungi semua agama dan menghargai perbedaan agama, suku, ras dan begitu seterusnya. Menurut pembacaan dan penemuan penulis terkait nilai-nilai Pancasila perspektif Al-Qur'an. Sila pertama menaungi semua agama yang berketuhanan, nilai-nilai Al-Qur'an yang tercantum pada sila pertama sangat Qur'ani, karena Al-Qur'an itu sendiri sangat menghargai agama-agama bahkan Al-Qur'an mengecam permusuhan agama-agama yang berketuhanan. Melihat nilai-nilai sila kedua, Negara Indonesia telah mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat menganjurkan berbuat adil serta mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, karena itu negara Indonesia melarang adanya diskriminasi dan bertindak tidak manusiawi. Melihat sila ketiga Indonesia membangun negara dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa, maka dari itu Indonesia menggunakan nilai-nilai persatuan. Maka Indonesia sangat Qur'ani ketika saling menghargai agama, suku dan begitu seterusnya. Melihat sila keempat nilai-nilai demokrasi (*musyawarah*) yang dibangun oleh

Pancasila adalah pada hakikatnya perintah Al-Qur'an, karena demokrasi adalah pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melihat sila kelima negara Indonesia telah mengamalkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sangat menganjurkan sifat-sifat keadilan dan mensejahterakan rakyat, yang kaya memberi dan tidak menindas dan begitu seterusnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin "Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer."* IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. (2006a). *Al-Jami'u Al-Ahkam Al-Qur'an*. Mu'assah Al-Risalah.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. (2006b). *Al-Jami'u Al-Ahkam Al-Qur'an*. Mu'assah Al-Risalah.
- Al-Razi, M. F. (1981). *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi*. Dar Al-Fikr.
- Al-Shawi, A. bin M. (2007). *Hasyiat Al-Shawi ala Tafsir al-Jalalaini*. Darbu Al-Trak.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *Al-Dur Al-Mantsur bil Ma'tsur*. Dar al-Kutub.
- Al-Thabari, A. J. M. bin J. (2001). *Tafsir Al-Thabari "Jami'u al-Bayan an Ta'wil Iy Al-Qur'an."* Dar al-Fikr.
- Al-Zamakhsyari, A. A.-Q. M. bin U. (1998). *Al-Kasyaf an Haqaiqi Ghawamidi Al-Tanzil wa Uyunu Al-Aqawil fi Wujud Al-Ta'wil*. Maktabah Al-Abikan.
- Annibras, N. R. (2016). Hermeneutika Jorge J.E Gracia. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 1*.
- Arif, S. (2013). *Humanisme Gus Dur "Pergumulan Islam dan Kemanusiaan."* AR-RUZZ MEDIA.
- At-Tusi, A. J. M. bin H. (n.d.). *Al-Tibyan fi Tasir Al-Qur'an*. Daru Ihya'u Al-Turast Al-Arabi.
- Baidhawiy, Z. (2015). Negara Pancasila Negara Syari'ah. *Ma'arif, 10*.
- Basri, & Budiharto. (2020). Agama Sebagai Dasar Fundamental Dalam Negara Pancasila. *Jurnal PPKn & Hukum, 15*.
- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila "Relegion Of Pancasila's Enem? History Study Role Of Religion In Pancasila's Birth." *Jurnal :Al-Qalam, 26*.
- Gracia, J. J. E. (1995). *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*. State University of New York Press.
- Gusman, I. (2019). *Tafsir Al-Qur'an & Kekuasaan Di Indonesia "Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana."* Yayasan Salwa.
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. PT Kanisius.
- Hayyan, A. (1993). *Tafsir Bahru Al-Muhid*. Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Hidayat, F. (2017). *Pancasila Perspektif Pendiri RI & Problematikanya*. STBA Pertiwi Bekasi.
- Katsir, I. A. al-F. I. I. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Dar Al-Fikr.
- Kiptiyah, S. M. (2020). *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan dan Narasi Reformisme*. Elsa.
- Kulsum, U. (2020). Kontestasi Islam Wasatiyah dan Pancasila Serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *JIC : Journal of Islamic Civilization, 2*.
- Latif, Y. (2018). Identitas Keindonesian dan Aktualisasi Pancasila Bagi Bangsa Milenial di Era Digital. *Jurnal Kajian Lemahannas RI, 6*.
- Mulkhan, A. M. (2007). *Islam, HAM, dan Keindonesiaan Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*. MAARIF Institute for Culture and Humanity.
- Muslim, A. T. (2018). "Diskursus Fertilitas Dalam Perspektif Hadis", Aplikasi Hermeneutik Fungsionalisme Jorge J.E Gracia. *Jurnal Living Hadis, III*.

- 
- Musolin, M. (2020). The Vertues Of Maqasid Al-Syari'ah In Pancasila As The Philosophical Basic Of The Indonesia Republic. *Dialog*, 43.
- Pedju, R. P. (2019). Analisa Konsep Uneversalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif). *Potret Pemikiran*, 23.
- Rato, D. (2017). *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. LKiS.
- Septian, D. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat. *Tanjak : Journal of Education and Teaching*, 1.
- Siti Nurjannah. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Pelajar (Upaya Mencegah Aliran Anti Pancasila di Kalangan Pelajar). *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama*, 5.
- Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila Dalam Pemikiran Mohammad Natsir. *ALFUAD : Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan*, 3.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika Dan Pengembangan Uluml Qur'an*. Pesantren Nawesa Press.
- Syamsuddin, S. (2020). *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis "Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer."* Asosiasi Ilmu Alqur'an & Tafsir se-Indonesia.
- Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam "Espansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia."* Gerakan Bhinneka Tunggal Ika.
- Wahid, A. (2011). *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Democracy.
- Wathani, S. (2017). Hermeneutika Jorge J.E. Gracia Sebagai Alternatif Teori Penafsiran Tekstual Alqur'an. *Al-A'raf*, XIV.
- Watra, I. W. (2020). *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. UNHI Press.